

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dikategorikan negara maju atau berkembang bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara tersebut. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya mempunyai kualitas kehidupan yang baik juga, begitupun sebaliknya. Negara yang kondisi ekonomi rendah tentu kualitas kehidupan masyarakatnya tentu kurang baik. Didalam pertumbuhan ekonomi suatu negara ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

Pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari kenaikan dari *Gross Domestic Product* (GDP) dengan tidak melihat apakah ada kenaikan yang besar atau kecil dari pertumbuhan penduduk ataupun mengalami perubahan struktur ekonomi atau tidak.¹ Dalam kondisi perekonomian yang berkembang biasanya dapat kita lihat dari adanya peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Tetapi tidak selalu pendapatan perkapita tersebut selalu mengalami peningkatan, ada beberapa kondisi dimana perekonomian mengalami penurunan seperti adanya sebuah resesi, adanya kekacauan politik di sebuah negara, ataupun menurunnya ekspor dari negara tersebut.

Salah satu indikator dalam dalam mengukur keberhasilan pembangunan dalam sebuah negara salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi dengan melihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebuah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi berupa barang dan jasa

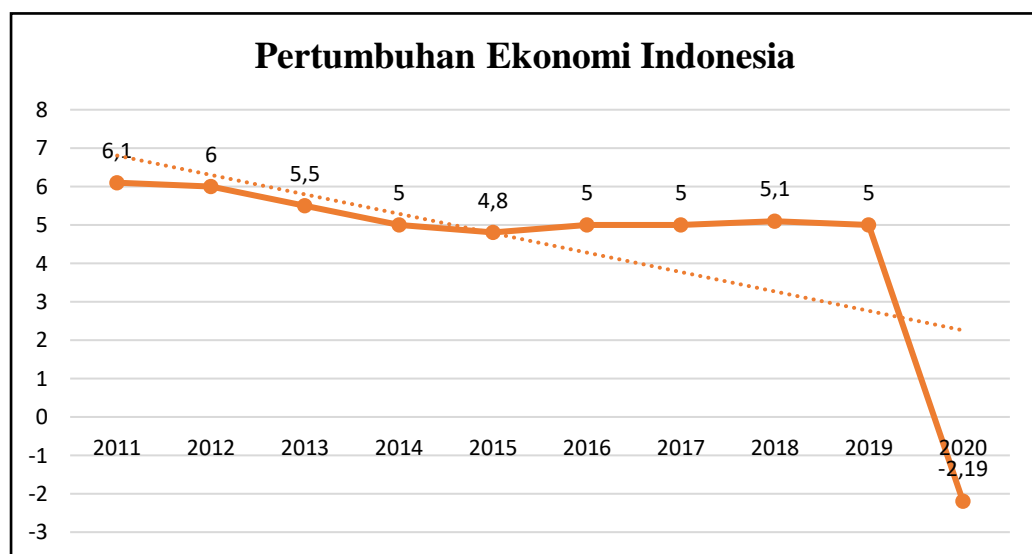
¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabet, 2014) hlm 15

dalam suatu wilayah untuk suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki sebagai residen ataupun non residen.

Indonesia merupakan negara berkembang yang tentunya akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini bisa kita lihat dalam data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai berikut:

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



Sumber: <https://www.bps.go.id/> Tahun 2011 -2020 (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan data *World Bank* pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1% paling tinggi diantara tahun lainnya. Di tahun 2015 menjadi pertumbuhan paling rendah dengan 4,8%. Dan sampai 2019 stagnan diangka kurang lebih 5% tiap tahun. Bahkan di tahun 2020 mengalami penurunan hingga -2,19% akibat pandemi Covid-19.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia diantaranya adalah ekspor, penerimaan pajak, serta nilai tukar yang secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.²

Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam G20 yakni kelompok negara-negara industri dan negara diambang industri, atau bisa juga disebut kumpulan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia sendiri menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik ketiga diantara negara G20 pada tahun 2019 dibawah negara India dan China. Namun ketika melihat PDB atau Produk Domestik Bruto negara kita masih jauh dibandingkan dengan negara lainnya. Negara kita mempunyai PDB 1.074.966 US\$ pada tahun 2019 dan menempati posisi 16 diantara negara G20.³ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi kita bisa dibilang baik dibanding negara lain, tetapi dalam segi PDB yang dihasilkan negara kita masih bisa dikatakan belum tumbuh secara signifikan. PDB sendiri adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu satu tahun, yang berasal dari seluruh warga dan perusahaan yang berdiri di Indonesia, termasuk perusahaan dan warga asing. Oleh karena itu masih perlu lagi upaya yang ekstra dari pemerintah didalam pembangunan ekonomi.

² Syahputra, Rinaldi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1.2 .2017. hlm 183-191.

³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628134408-532-407329/melihat-taji-indonesia-di-antara-negara-raksasa-g20> dikases pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 19:33 WIB

Dalam sebuah pembangunan ekonomi sesungguhnya mempunyai banyak sekali sebuah proses yang melibatkan berbagai perubahan didalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, serta penanggulangan kemiskinan.⁴ Keberhasilan dalam membangun ekonomi bisa diukur dengan indikator moneter ataupun non moneter untuk melihat bagaimana peningkatan pembangunan ekonomi sehingga dapat dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan dalam suatu wilayah, karena sebuah pembangunan pasti diawali dari manusia, yang dilakukan oleh manusia, dan tentu ditujukan bagi manusia.

Sumber daya manusia inilah yang merupakan modal penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menjadikan sebuah negara dapat berkembang dan tumbuh maju dengan memiliki kemampuan serta ketrampilan bagi setiap individunya. Dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kehidupan yang sehat, berpendidikan yang tinggi, mempunyai keterampilan, memiliki daya saing, dan mempunyai pendapatan akan mampu memenuhi kehidupannya dengan baik. Maka keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat tercermin dari keberhasilan manusia nya.

United Nations Development Program atau (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk memberi peringkat terhadap kinerja pembangunan berbagai negara di dunia, sehingga dapat diketahui kelompok negara dengan tingkat

⁴ Micael P. Todaro, etc, "*Pembangunan Ekonomi*", (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 18

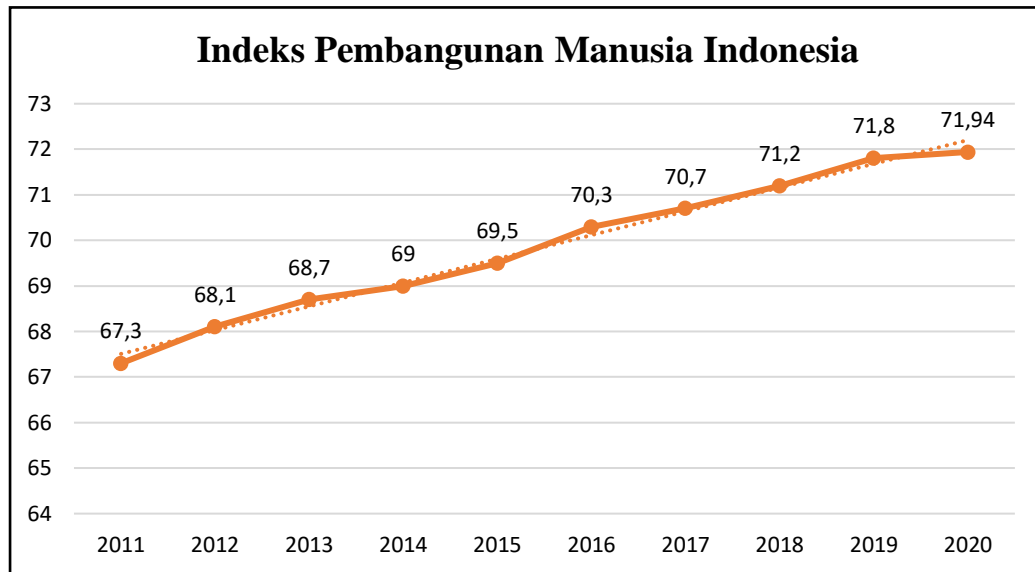
pembangunan manusia yang rendah atau (*low human development*), kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), serta kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi atau (*high human development*).

Indeks Pembangunan Manusia mengukur dari tiga aspek, yaitu berdasarkan umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam konsep Indeks Pembangunan Manusia mampu memberikan gambaran bagaimana keberhasilan pembangunan sebuah negara atau wilayah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah negara ataupun wilayah dalam pembangunan manusia, tidak hanya bergantung pada pendapatan perkapita⁵. Banyak atau sedikitnya anggaran pemerintah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan manusia merupakan cerminan keberpihakan pemerintah baik negara ataupun daerah terhadap pembangunan manusia tersebut.

Perkembangan pencapaian pembangunan manusia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2011-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵ Lincoln Arsyad, "*Ekonomi pembangunan*", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) hlm 48

Grafik 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia



Sumber: <http://hdr.undp.org/> Tahun 2011 -2020 (data diolah tahun 2021)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Indeks pembangunan Manusia di Indonesia selalu mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun sumberdaya manusia menunjukkan ada trend positif disetiap tahunnya dalam bidang pembangunan manusia di Indonesia.

Namun dibandingkan dari negara di dunia dan dikawasan ASEAN, IPM Indonesia berada di peringkat 5 ASEAN dan 107 di dunia dari 189 negara. Di Kawasan ASEAN Indonesia berada dibawah Singapura yang menduduki negara dengan IPM yang paling bagus di ASEAN dan juga menduduki peringkat 11 dunia. Selanjutnya disusul Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.⁶ Hal ini perlu

⁶<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2> diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 19:45 WIB

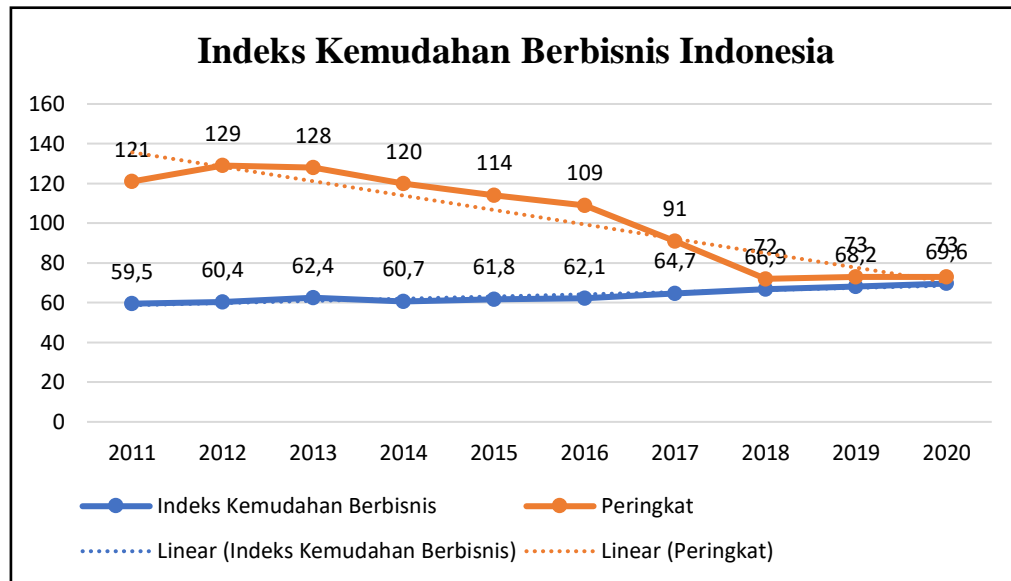
adanya evaluasi yang besar bagi seluruh elemen untuk terus mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan manusia tersebut yang terdiri dari dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan juga dimensi standar hidup layak.

Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara pasti akan melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang mengarah pada percepatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah bagaimana menjaga iklim dunia usaha atau bisnis tersebut menjadi lebih baik. Bank Dunia setiap tahun mengeluarkan peringkat kemudahan berbisnis. Dari hasil survey terhadap kualitas dan juga efisiensi regulasi yang dikenal dengan *ease doing business rankings*. Dalam hasil penyusunan laporan tersebut, ada sepuluh jenis indikator yang ditetapkan Bank Dunia untuk mengukur tingkat kemudahan berbisnis di wilayah suatu negara yaitu: (1) memulai usaha (*starting business*), (2) perizinan pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), (3) pencatatan tanah dan bangunan (*registering property*), (4) pembayaran pajak (*paying taxes*), (5) kemudahan memperoleh kredit (*getting credit*), (6) pemenuhan kontrak (*enforcing contract*), (7) ketersediaan listrik (*getting electricity*), (8) perdagangan lintas negara (*trading across borders*), (9) penyelesaian perkara pailit (*resolving insolvency*), (10) perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*).

Berdasarkan hasil survei tersebut, peringkat kemudahan berusaha (*ease doing business rankings*) negara Indonesia menunjukkan fluktuasi, tetapi lebih cenderung mengarah kepada peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Grafik 1.3

Indeks Kemudahan Bisnis di Indonesia



Sumber: <https://www.doingbusiness.org/> tahun 2011-2020 (data diolah tahun 2021)

Dilihat dari grafik diatas dalam dua tahun terakhir posisi Indonesia stagnan di peringkat 73 tetapi dalam nilai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahwa adanya stagnansi peringkat kemudahan berbisnis tersebut dikarenakan birokrasi di Indonesia yang sangat banyak sekali, sehingga investor harus mengajukan izin berbeda-beda tidak melalui satu pintu baik izin di kementerian, pemerintah daerah, ataupun Lembaga.⁷ Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia pun juga masih kalah dibanding dengan negara tetangga. Di Kawasan ASEAN Indonesia menempati peringkat 6 dan peringkat 73 di dunia, berbeda jauh dengan Singapura yang menempati peringkat pertama di ASEAN dan peringkat kedua di

⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-stagnan-di-posisi-73-ini-kata-kepala-bkpm> diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 20:10 WIB

dunia. Dan Laos yang selalu menempati peringkat terakhir di ASEAN dalam 10 tahun terakhir dalam peringkat kemudahan berbisnis.

Penelitian yang dilakukan Theodoris tentang kemudahan berbisnis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dari tiga variabel yang diteliti yakni kemudahan berbisnis, *foreign direct investmen*, dan populasi penduduk ketiga nya secara simultan mempunya pengaruh terhadap perekonomian negara-negara di ASEAN yang dilihat dari PDB.⁸ Dari hasil grafik *time series* Indeks Kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan bahwa kemudahan berbisnis menjadi salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berbisnis tentunya mengalami banyak kendala atau hambatan baik dari internal maupun eksternal. Salah satunya adalah budaya Korupsi yang masih banyak dilingkungan pejabat negara kita. Hal inilah yang mungkin bisa menghambat proses percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena ketika pemerintah menggelontorkan APBN ataupun APBD yang bertujuan untuk percepatan ekonomi tetapi disalahgunakan oleh para pejabat, akan mengakibatkan melambatnya usaha tersebut sehingga mengganggu kelancaran dunia usaha atau bisnis.

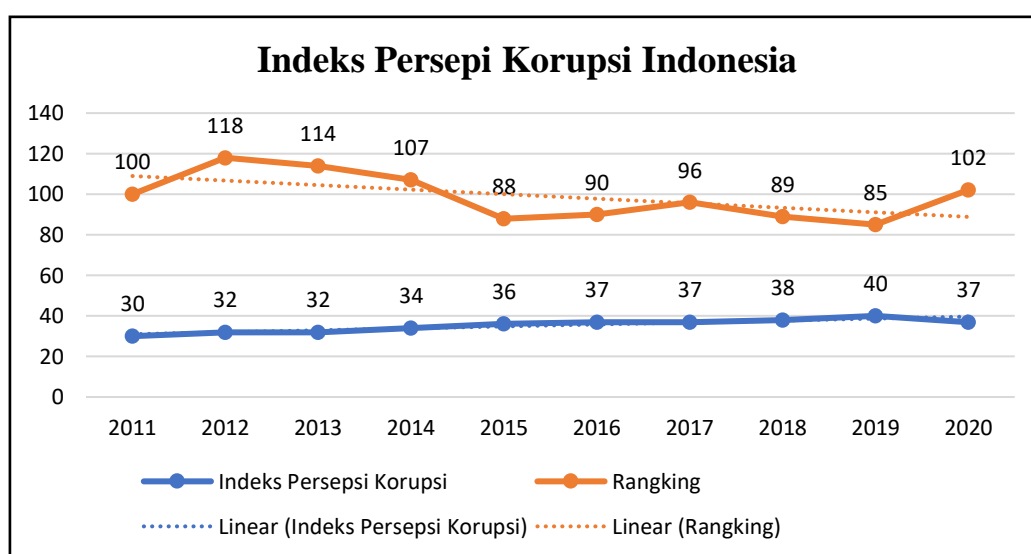
Setiap negara tidak sepenuhnya terbebas dari adanya prakter korupsi. Korupsi tidak memandang apakah negara tersebut maju atau sedang berkembang. Tetapi

⁸ Theodoris, Daniel. "Pengaruh Indeks Kemudahan Berbisnis, Forein Direct Investmen, dan Populasi Penduduk terhadap Perekonomian ASEAN", dalam E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 6, No 12, Desember 2017

yang membedakan adalah potensinya. Negara maju cenderung memiliki potensi praktik korupsi yang lebih rendah, sedangkan negara berkembang justru memiliki potensi praktek korupsi yang cenderung tinggi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi korupsi yang cenderung masih tinggi. Hal ini dapat kita lihat dalam Indeks Persepsi Korupsi sebagai berikut:

Grafik 1.3

Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia



Sumber: <https://www.transparency.org/> tahun 2011-2020 (data diolah tahun 2021)

Tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, hal itu terlihat dari data tahun 2011-2020 berada di 30 point dan terus meningkat sampai 40 point. Tingkat korupsi yang rendah adalah ketika nilai yang ada mendekati 100. Untuk peringkat Indonesia menduduki posisi 85 dari 180 negara dengan skor 40 point di tahun 2019. Namun ditengah isu sekarang tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan maraknya penangkapan OTT beberapa Menteri dan Kepala Daerah menyebabkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 melorot 3

poin menjadi 37, dan berada di posisi 102 dari 180 negara yang disurvei.⁹ Hal ini tentunya menjadi pekerjaan bagi para penegak hukum dan juga pemerintah bagaimana mencegah Tindakan korupsi tersebut. Dikarenakan hal ini nanti juga berkaitan dengan bagaimana kemudahan berbisnis di Indonesia supaya bisa maju. Karena dengan adanya birokrasi yang bersih dari adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya percepatan kemudahan izin didalam negara tersebut maka juga akan banyak menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia tentunya memiliki potensi pengembangan ekonomi Islam yang sangat besar. Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah penyaluran dana zakat, infq, dan sedekah (ZIS). Penyaluran dana zalat, infaq, dan sedekah secara optimal dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam setiap umat muslim mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut bertujuan agar harta yang dimiliki dapat berputar pada perekonomian atau bisa disebut produktif. Dengan perputaran harta lewat zakat ini maka akan dapat meningkatkan jumlah output sehingga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi meningkat, penyerapan tenaga kerja, pendapatan, kesejahteraan masyarakat pun juga akan meningkat.¹⁰ Potensi zakat di Indonesia terbilang sangat besar, bahkan angkanya mencapai Rp

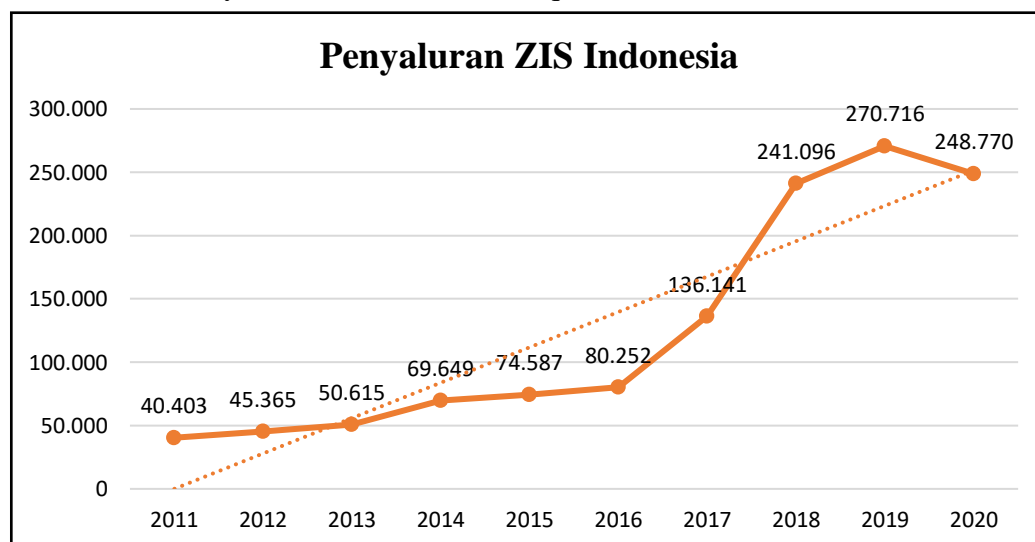
⁹<https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin> diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 20:33 WIB

¹⁰ Rachma Anggraini, “Pengaruh Dana ZIS dan Tingkat Inflai terhadap Pertumbuhan Ekonmi Indonesia Periode 2011-2015”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3, No 2, Agustus 2018, hlm 4.

233,8 triliun termasuk zakat profesi menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Walaupun potensinya besar, tetapi dalam pendistribusian dan pendaayagunaannya terbilang masih rendah yang idealnya 87,5% tetapi masih terealisasi 83,7%¹¹. Hal yang perlu adanya beberapa kebijakan dalam optimalisasi zakat diantaranya adalah adanya regulasi yang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perlu adanya dukungan kelembagaan baik berupa kapasitas system kelembagaan ataupun sumber daya manusia di BAZNAS maupun LAZNAS. Dan perlu adanya literasi dan pemahaman public terhadap zakat. Baik melalui dakwah ataupun bentuk sosialisasi lainnya. Untuk mengetahui jumlah penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) bis akita lihat dalam tabel berikut ini:

Grafik 1.5

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Indonesia



(Sumber: <https://baznas.go.id/> tahun 2011-2020 (data diolah tahun 2021))

¹¹<https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all> diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pada pukul 20:58 WIB

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 penyaluran dana ZIS pada angka 30,010 milyar, pada tahun berikutnya yaitu 2011 meningkat 40,403 milyar, peningkatan dari tahun 2010 sampai 2016 cenderung mengalami peningkatan secara landai. Peningkatan secara signifikan terjadi mulai tahun 2017 ke 2018, tahun 2018 penyaluran ZIS meningkat di angka 241,096 milyar dan terus meingkat pada tahun 2019 pada angka 270,761 milyar. Dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 pada angka 248,770 milyar.

Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang semakin baik maka akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purwanti yang menyatakan bahwa dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan ditingkatkannya zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dan berpengaruh pada peningkatan konsumsi mustahik atau orang yang berhak menerimazakat dalam hal ini adalah golongan 8 asnaf yang berhak menerima, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi sgregat, kemudoan selanjutnya akan meningkatkan PDB riil nasional.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemudahan Berbisnis, Indeks Persepsi Korupsi, dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”.

¹² Dewi Purwanti, “*Pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 6 (01), 2020, hlm 106

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Indonesia yang masih belum memenuhi target pemerintah. Dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
- b. Kemudahan berbisnis di Indonesia masih rendah dari negara-negara lain.
- c. Maraknya kasus korupsi baik yang menyangkut menteri ataupun pejabat daerah yang menjadi masalah dalam mempengaruhi pengusaha untuk memulai bisnis dan pertumbuhan ekonomi.
- d. Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah masih kurang optimal di Indonesia terutama dalam hal pendistribusian.

2. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi keterbatasan dari masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada variabel X yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X1), Kemudahan Berbisnis (X2), Korupsi (X3), dan Penyaluran ZIS (X4), variabel Y yaitu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
- b. Dalam penelitian ini menggunakan periode penelitian dari triwulan I tahun 2011 sampai dengan triwulan IV tahun 2020, sehingga sampel penelitian berjumlah 40 triwulan.

- c. Data yang diambil dalam penelitian ini yakni merujuk pada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, United Nations Development Program, Easy Doing of Business, Transparency International, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh indeks kemudahan berbisnis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, indeks kemudahan berbisnis, indeks persepsi korupsi, dan penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
2. Untuk menguji pengaruh indeks kemudahan berbisnis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Untuk menguji pengaruh indeks korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
4. Untuk menguji pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
5. Untuk menguji pengaruh indeks pembangunan manusia, indeks kemudahan berbisnis, indeks persepsi korupsi, dan penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

E. Hipotesis Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan peneliti mengambil Hipotesis penelitian sebagai berikut ini:

1. Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Indeks kemudahan berbisnis berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
3. Indeks persepsi korupsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

4. Penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
5. Indeks pembangunan manusia, indeks kemudahan berbisnis, indeks persepsi korupsi, dan penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehingga dapat memperkuat dan mengembangkan hasil temuan yang sudah ada serta memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan manusia, kemudahan berbisnis, korupsi, dan penyaluran dana ZIS serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi peneliti lain di bidang Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi rujukan didalam penelitian mengenai indeks pembangunan manusia, kemudahan berbisnis, korupsi, dan penyaluran dana ZIS serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Pertumbuhan ekonomi, merupakan sebuah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka Panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka Panjang.¹³
- b. Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah pengukuran yang digunakan dalam menilai pembangunan manusia di suatu negara dengan menggunakan kombinasi dari bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.¹⁴
- c. Kemudahan Berbisnis yang dipublikasikan oleh World Bank yang didalamnya terdapat banyak indikator dan parameter berbeda yang mendefinisikan

¹³ Boediono, Seri *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm 1

¹⁴ Moh Muqorrobin, dkk. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 5 No. 3, (2017) Universitas Negeri Surabaya, hlm 3

kemudahan bisnis di berbagai negara. Ada beberapa indikator yaitu: memulai usaha, perizinan pendirian bangunan, pencatatan tanah dan bangunan, pembayaran pajak, kemudahan memperoleh kredit, pemenuhan kontrak, ketersediaan listrik, perdagangan lintas negara, penyelesaian perkara pailit, dan perlindungan terhadap investor minoritas.¹⁵

- d. Korupsi adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh para pejabat sebagai pemberian seseorang kepada seorang pejabat atau pegawai negeri dengan maksud untuk mempengaruhi agar memberikan perhatian yang istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Tiga fenomena yang mencakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan dan juga nepotisme.¹⁶
 - e. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau sebuah badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau sebuah badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan masyarakat umum. Sedekah adalah harta ataupun non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁷
2. Penegasan Operasional
- a. Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini didasarkan pada besarnya PDB atau produk domestik bruto di Indonesia, dengan berpedoman pada: $Y = C + I + G + (X - M)$

¹⁵ Daniel Theodoris, "Pengaruh Indeks Kemudahan Berbisnis, Foreign Direct Investment, dan Populasi Penduduk terhadap Perekonomian ASEAN", dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.6 No.12 Desember 2017

¹⁶ Alatas, Syed Hussein. 1982. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Matahari Bhakti. hlm 15

¹⁷ Dewi Purwanti, Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 2020

- b. Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

- c. Kemudahan Berbisnis atau *Ease of Doing Business* ditentukan berdasarkan skor *distance to frontier* (dtf). Skor *distance to frontier* merupakan akumulasi perhitungan total rata-rata dari semua topik *doing business*, kecuali *labour market regulation*.
- d. Korupsi diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* dengan rentang 0 – 100, apabila skor *CPI* mendekati 100, maka suatu negara dikatakan bersih dari korupsi. Dan sebaliknya apabila skor *CPI* suatu negara lebih mendekati 0 maka dapat dikatakan banyak korupsi yang terjadi di negara tersebut.
- e. Penyaluran Penyaluran dana zakat, infak sedekah adalah pendistribusian dari kegiatan zakat, infaq dan sedekah beberapa aspek yang membutuhkan baik aspek konsumtif atau produktif. Di Indonesia dana ZIS dikelola oleh BAZNAS.